



~~Gagasan & Inovasi~~ / Ulasan (delete yang tidak perlu)

## MENGUKUR POTENSI INOVASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA TAHUN 2021

<sup>1</sup>Benny Matriksa

<sup>1</sup>Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

(Diterima 1 November 2020; Direvisi 16 November 2020; Disetujui 17 November 2020; Diterbitkan 18 November 2020)

*Abstract: The background of this paper is the Decree of the Minister of Home Affairs number 002.6-115 of 2019 regarding the results of measuring the regional innovation index at the provincial level, in which the provincial government of DKI Jakarta is in second place. The identification of the problem is that there are fewer regional innovations produced by the DKI Jakarta provincial government, while the number of regional apparatus and the number of civil servants is more than other provinces. The purpose of this paper is to measure the potential for regional innovation consisting of regional governance innovations, public service innovations and other regional innovations in accordance with Government Affairs which are the authority of the Regions which have been running for 2 (two) years through post-leadership training evaluation. The research methodology used is descriptive analysis method with a quantitative approach carried out by collecting secondary data and analyzing the data and making conclusions objectively in a description. The results of the discussion are First, based on the percentage of change project sustainability level of the alumni of the Level IV Leadership Training alumni respondents is 79.41%. Meanwhile, the total alumni of Level IV Leadership Training and Education are 149 people. Then the estimated project changes that will continue and become the potential for regional innovation are 118 innovations. Second, based on the percentage of the level of change project sustainability of the Level III Leadership Training alumni respondents, it is 85.41%. Meanwhile, the total number of Level III Leadership Training alumni was 121 people. Then the estimated change projects that continue and become the potential for regional innovation are 103 innovations. The conclusions obtained are first, the potential for regional innovation that comes from the sustainability of change projects produced by the alumni of Level IV and Level III leadership training in 2019, the DKI Jakarta provincial government has identified as many as 221 innovations. The number of potential innovations in this area increased by 62.5% compared to 2019 with 163 innovations. Second, the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) together with the DKI Provincial Human Resources Development Agency (BPSDM) collaborate to provide support for leadership training alumni whose innovation continues.*

*Keywords: regional innovation potential, regional innovation index*

Corresponding author: Benny Matriksa, e-mail : bennymatriksa@yahoo.com, Tel : +62812-3252-576.

## Pendahuluan

Dalam laporan *Global Innovation Index* tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 85 dengan skor 26,49. Namun, posisi dan keadaan inovasi di Indonesia tidaklah terlalu menggembirakan karena peringkat Indonesia masih dibawah negara tetangga di Asia Tenggara, antara lain Singapura ( peringkat 8), Malaysia ( peringkat 33), Vietnam ( peringkat 42) dan Thailand (peringkat 44). Jika Indonesia tidak memperbaiki diri, maka tantangan dan peluang Indonesia semakin berat. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah dan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Sehingga dibutuhkan kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara-cara seperti itulah maka inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Di era persaingan global, inovasi di sektor publik merupakan suatu strategi yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Pada situasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi dan kemampuan berinovasi di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Inovasi masih dianggap hal yang aneh, tidak disukai, bahkan cenderung dihindari karena pandangan yang keliru bahwa inovasi merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan berjalan terus namun harus dihentikan dan bahkan perlu dibalik. Pihak Pemerintah perlu diyakinkan bahwa berinovasi di sektor publik itu menyenangkan dan mudah dilakukan.

Inovasi menjadi komponen penting dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, privat, masyarakat harus melakukan inovasi. Inovasi di lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena mengakselerasi inovasi privat dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah adalah ujung tombak pelayanan publik terdekat dengan masyarakat yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daerah untuk berdaya saing ino juga akan berpengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemahaman pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Kriteria Inovasi itu adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan,

berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menuntut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi daerah dalam rangka peningkatan tata kelola, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 386 ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Dan pasal 388 ayat (7) bahwa Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Dalam hal tersebut Menteri yang dimaksudkan adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri melaksanakan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan /atau insentif kepada pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pada Pasal 22 Ayat (1) Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. Dan Pasal 14 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah menggagas kegiatan sebagai upaya mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Kegiatan tersebut adalah penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga pemerintah daerah harus melakukan pembaharuan dan perlu didorong untuk dapat membuat kebijakan yang inovatif guna mensejahterakan masyarakatnya. sedangkan Penghargaan *Innovative Government Award* adalah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Latar belakang kajian ini adalah keputusan Menteri dalam negeri nomor 002.6-115 Tahun 2019 tentang penyusunan hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada pusat penelitian dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2019. Keputusan tersebut berisi peringkat indeks inovasi daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun hasil pengukuran

indeks inovasi daerah pada tingkat provinsi, pemerintah provinsi DKI Jakarta pada peringkat kedua di bawah provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019

Peringkat	Provinsi	Indeks	Predikat
1	Jawa Barat	59350	Sangat inovatif
2	DKI Jakarta	51870	Sangat inovatif
3	Sumatra Barat	41950	Sangat inovatif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-115 Tahun 2019 tentang penyusunan hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada pusat penelitian dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2019

Tujuan tulisan ini adalah mengukur potensi inovasi daerah yang terdiri dari inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, Inovasi pelayanan publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun melalui evaluasi pasca diklat kepemimpinan. Inovasi pemerintahan daerah yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhitung mulai tahun 2019, dimana nantinya data inovasi digunakan untuk mengukur kualitas indeks inovasi daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. Dilanjutkan dengan menganalisis/mengolah data, membuat kesimpulan untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi.

## Analisa

Menganalisa hasil pengukuran indeks inovasi daerah tersebut, Provinsi DKI Jakarta seharusnya memiliki potensi untuk memperoleh peringkat pertama karena mengingat jumlah perangkat daerah yang dimiliki lebih banyak dan termasuk didalamnya adalah 5 (lima) pemerintah kota administratif serta 1 (satu) pemerintah kabupaten administratif kepulauan seribu. Bahkan Pemerintah Provinsi juga memiliki 44 kecamatan dan 267 kelurahan yang diangkat dan dilantik langsung oleh Gubernur, dimana kondisi berbeda dibandingkan provinsi otonom lainnya.

Tabel 2. Jumlah SKPD dan PNS pada 3 Provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Tahun 2019

Peringkat	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah PNS
1	Jawa Barat	38	36.135 <sup>1)</sup>
2	DKI Jakarta	42	60.005 <sup>2)</sup>
3	Sumatra Barat	38	8.225 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Data Jumlah PNS Provinsi Jawa Barat Bulan Februari 2020;

<sup>2)</sup> Data Jumlah PNS Provinsi DKI Jakarta November 2020;

<sup>3)</sup> Data Jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat 2015

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, pada Pasal 10 ayat (1) bahwa Data Indeks Inovasi Daerah, merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Ini berarti bahwa untuk data indeks inovasi tahun 2021 berasal dari inovasi daerah terhitung 1 Januari 2019 – 31 Desember 2020

Inovasi daerah pemerintah provinsi DKI Jakarta secara umum berasal dari proyek perubahan yang dihasilkan dari alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV. Baik yang mengikuti pelatihan di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maupun di Kementerian/Lembaga pemerintah yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

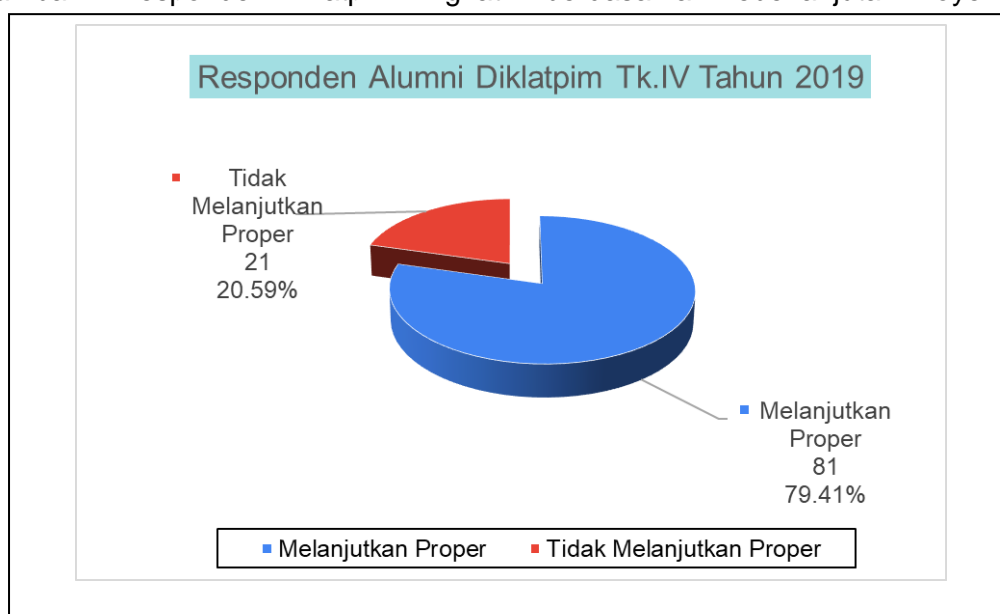
Tabel 3. Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III tahun 2019

No.	Jenis Diklat	Jumlah Alumni (Orang)
1	Diklatpim Tingkat IV Tahun 2019 <sup>1)</sup>	149
2	Diklatpim Tingkat III Tahun 2019 <sup>2)</sup>	121
	Total	270

Sumber : <sup>1)</sup> Laporan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun Anggaran 2019; <sup>2)</sup> Laporan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun Anggaran 2019;

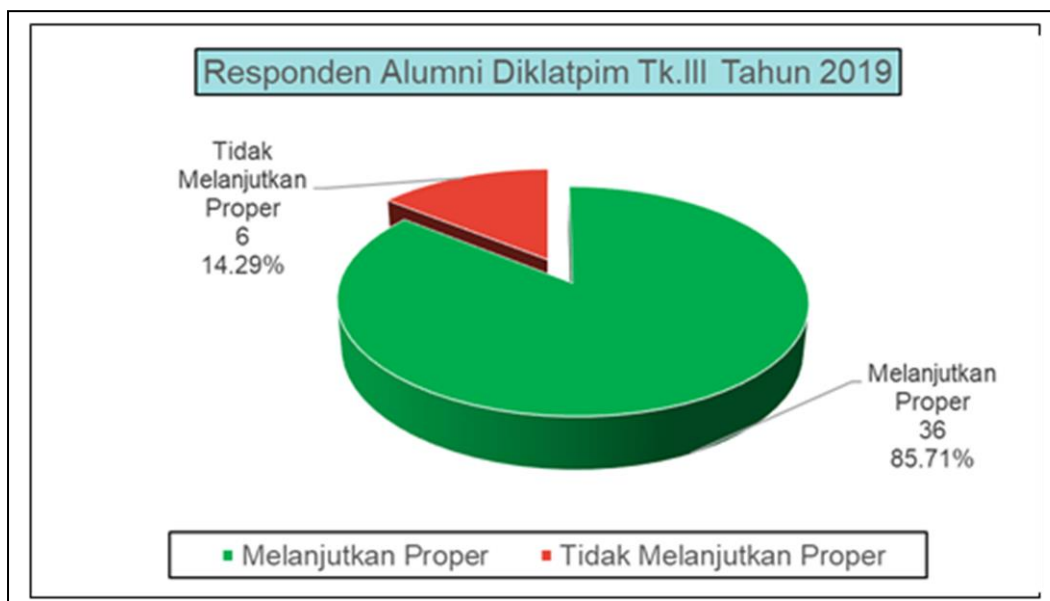
Hasil Evaluasi Pasca Diklat Tahun Anggaran 2020 kepada Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2019 menggunakan responden dari alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV tahun 2019 sebanyak 149 orang. Pengumpulan data jumlah kuesioner alumni pelatihan tersebut yang berhasil diterima pihak BPSDM Provinsi DKI Jakarta dari para responden sebesar 102 kuesioner. Dari 102 responden alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang menyatakan bahwa proyek perubahannya masih terus dilaksanakan setelah pelatihan selesai sebanyak 81 orang atau 79,41%. Sedangkan yang menyatakan tidak diteruskan sebanyak 21 orang atau 20,59 % ( Gambar 2.)

Gambar 1. Responden Diklatpim Tingkat IV berdasarkan Keberlanjutan Proyek Perubahan



Hasil Evaluasi Pasca Diklat Tahun Anggaran 2020 kepada Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2019 menggunakan responden dari alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III tahun 2019 sebanyak 121 orang. Pengumpulan data jumlah kuesioner alumni pelatihan tersebut yang berhasil diterima pihak BPSDM Provinsi DKI Jakarta dari para responden sebesar 42 kuesioner. Dari 42 responden tersebut yang menyatakan proyek perubahannya masih terus dilaksanakan setelah pelatihan selesai sebanyak 36 orang atau 85,41%, sedangkan yang menyatakan tidak diteruskan sebanyak 6 orang atau 14,28%. ( Gambar 3 )

Gambar 2. Responden Diklatpim Tingkat III berdasarkan Keberlanjutan Proyek Perubahan



Berdasarkan evaluasi pasca diklat tahun anggaran 2020 yang dilakukan pada alumni diklat kepemimpinan tingkat IV dan alumni diklat kepemimpinan tingkat IV Tahun 2019, dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

**Pertama,** Berdasarkan persentase tingkat keberlanjutan proyek perubahan dari responden alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah 79,41%. Sedangkan jumlah keseluruhan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 149 orang. Maka perkiraan proyek perubahan yang berlanjut dan menjadi potensi inovasi daerah sebanyak 118 inovasi.

**Kedua,** Berdasarkan persentase tingkat keberlanjutan proyek perubahan dari responden alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah 85,41%. Sedangkan jumlah keseluruhan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 121 orang. Maka perkiraan proyek perubahan yang berlanjut dan menjadi potensi inovasi daerah sebanyak 103 inovasi.

Tabel 4. Perhitungan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III Tahun 2019 yang melanjutkan proyek perubahan

No.	Jenis Diklat	Jumlah Alumni (Orang)	Persentase Proyek Perubahan Berlanjut (%) <sup>1)</sup>	Proyek Perubahan Alumni Berlanjut (Inovasi)
1	Diklatpim Tingkat IV Tahun 2019	149	79.41	118
2	Diklatpim Tingkat III Tahun 2019	121	85.71	103
	Total	270		221

Sumber : <sup>1)</sup> Laporan Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III Tahun Anggaran 2020

Dari hasil diatas, jika mengacu pada data inovasi daerah tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan 136 inovasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, dan inovasi tersebut mendapat apresiasi dengan indeks inovasi daerah sebesar 51.870 poin atau selisih 7.480 poin dari Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat yang sebesar 59.350.

Maka berdasarkan evaluasi pasca diklat terhadap keberlanjutan proyek perubahan oleh alumni diklat kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III Tahun 2019 maka potensi data inovasi daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diinput melalui Sistem Aplikasi Indeks Inovasi Daerah sebanyak 221 inovasi atau meningkat sebesar 62.5 % di bandingkan data inovasi yang diinput pada tahun 2019.

Dengan potensi data inovasi yang dihasilkan sebanyak itu maka Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memiliki indeks inovasi daerah yang lebih besar dibandingkan saat ini sehingga Provinsi DKI Jakarta sangat berpotensi naik peringkat ke urutan pertama.

## Kesimpulan

**Pertama**, potensi inovasi daerah yang berasal dari keberlanjutan proyek perubahan yang dihasilkan oleh alumni diklat kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III Tahun 2019 pemerintah provinsi DKI Jakarta telah diidentifikasi sebanyak 221 inovasi. Jumlah potensi inovasi daerah ini meningkat sebesar 62.5 % dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 136 inovasi.

**Kedua**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI berkolaborasi untuk memberikan dukungan kepada alumni diklat pemimpinan yang inovasinya terus berjalan.

**Ketiga**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat mengumpulkan alumni diklat kepemimpinan guna memantau inovasi yang dilakukan sehingga dapat mengetahui kendala baik penganggaran, dukungan pimpinan, sarana dan prasarana teknologi informasi dan kebutuhan data selama proses inovasi.

**Keempat**, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan evaluasi pasca diklat dapat mengetahui alumni Diklat

Kepemimpinan guna memantau alumni yang proyek perubahan yang terus berlanjut dan membantu menyelesaikan permasalahan proyek perubahan yang terkendala melalui klinik dan konsultasi inovasi.

## Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada reviewer yang telah bersusah payah mereview karya tulis penulis, kepada pimpinan redaksi yang telah menyetujui dan berkenan menerbitkan karya tulis ini dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara IWI Provinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rakornas Kelitbangam Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019, Bidakara Hotel Jakarta, 21 Nopember 2019,
- Keputusan Menteri dalam negeri nomor 002.6-115 Tahun 2019 tentang penyusunan hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada pusat penelitian dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019
- Laporan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun Anggaran 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Laporan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun Anggaran 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Laporan Evaluasi Pasca Diklat Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun Anggaran 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Laporan Evaluasi Pasca Diklat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun Anggaran 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- <https://money.kompas.com/read/2020/09/03/190000126/ini-peringkat-indonesia-di-indeks-inovasi-global-2020>
- <https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/250/> Rapat Persiapan Validasi Indeks Inovasi Daerah dalam Rangka Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019



**Abstrak:** Latar belakang tulisan ini adalah keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 002.6-115 Tahun 2019 tentang hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada tingkat provinsi, dimana pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di peringkat kedua. Identifikasi masalahnya adalah inovasi daerah yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta lebih sedikit, sementara jumlah perangkat daerah dan jumlah PNS lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Tujuan tulisan ini adalah mengukur potensi inovasi daerah yang terdiri dari inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, Inovasi pelayanan publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun melalui evaluasi pasca diklat kepemimpinan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan menganalisis data serta dibuat kesimpulan secara objektif dalam suatu deskripsi. Hasil pembahasan yaitu **Pertama**, Berdasarkan persentase tingkat keberlanjutan proyek perubahan dari responden alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah 79,41%. Sedangkan jumlah keseluruhan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 149 orang. Maka perkiraan proyek perubahan yang berlanjut dan menjadi potensi inovasi daerah sebanyak 118 inovasi. **Kedua**, Berdasarkan persentase tingkat keberlanjutan proyek perubahan dari responden alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah 85,41%. Sedangkan jumlah keseluruhan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 121 orang. Maka perkiraan proyek perubahan yang berlanjut dan menjadi potensi inovasi daerah sebanyak 103 inovasi. Kesimpulan yang didapatkan yaitu **Pertama**, potensi inovasi daerah yang berasal dari keberlanjutan proyek perubahan yang dihasilkan oleh alumni diklat kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III Tahun 2019 pemerintah provinsi DKI Jakarta telah diidentifikasi sebanyak 221 inovasi. Jumlah potensi inovasi daerah ini meningkat sebesar 62.5 % dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 136 inovasi. **Kedua**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI berkolaborasi untuk memberikan dukungan kepada alumni diklat pemimpinan yang inovasinya terus berjalan.

**Kata kunci :** potensi inovasi daerah, indeks inovasi daerah

---

Corresponding author: Benny Matriksa, e-mail : [bennymatriksa@yahoo.com](mailto:bennymatriksa@yahoo.com), Tel : +62812-3252-576